

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Terjadinya sengketa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta terkait regulasi reklamasi Teluk Jakarta karena lahirnya ijin reklamasi membutuhkan proses yang rumit dan penuh dengan banyaknya peraturan yang ada. Beberapa peraturan tersebut tumpang tindih dan bertolak belakang. Pihak yang seharusnya bertanggung jawab dalam urusan reklamasi pun berpindah-pindah.
2. Cara penyelesaian sengketa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai pengaturan regulasi reklamasi Teluk Jakarta cara penyelesaian sengketanya yaitu dikaitkan dengan Undang-Undang Keuangan Negara, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Namun, beberapa permasalahan selain hal-hal tersebut, maka cara dan alternatif penyelesaian sengketa kewenangan belum jelas diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

B. Saran

1. Segala produk hukum yang dinuat di Indonesia sebaiknya berdasarkan dan mengacu pada peraturan sejenis yang telah berlaku sebelumnya agar tidak terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan, sebaiknya segala regulasi yang dibuat tidak berdasarkan atas kepentingan segolongan pihak saja tapi tentunya harus bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.
2. Untuk segala permasalahan sengketa antar lembaga Negara baik itu menyangkut urusan pemerintah pusat dan daerah sebaiknya dibuat aturan lenih lanjut agar memiliki payung hukum yang jelas, yaitu dengan menambahkan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sengketa antar Lembaga Negara penyelenggara pemerintahan yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ade Saptono, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2010.

Amirudin dan Zaenal Hasikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2006.

Arief Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, Gramedia Pustaka utama, Jakarta, 2000.

Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*,: Pusataka Sinar Harapan Jakarta, 1994.

Bambang Yudoyono. *Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD*, Pustaka Sinar Harapan, 2003.

Basuki Rekso Wibowo, *Peranan Hakim dalam Pembangunan Hukum*, Pro Justitia, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Tahun XV, Nomor 4, Oktober 1997.

Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH Unika Parahyangan, Bandung, 2010.

Budiman NPD, *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

- Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- Ernan Rustiadi, Saefulhakim, Dyah R. Panuju, *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2009.
- Jazim Hamidi, dkk, *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, Prestasi Pustaka Karya, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2007.
- Jimly Asshiddiqie. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Kamal Hidjaz. *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar, 2010.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Mahmutarom HR., *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2009.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius, Yogyakarta, 2010.

- Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah*, FH UII Press Yogyakarta, 2007.
- Nurmayani S.H.,M.H. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung Bandarlampung. 2009.
- Rebecca M Wallace (Penerjemah : Bambang Arumanandi), "*Hukum Internasional*", Semarang, IKIP Semarang Press, 1993.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2013.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006
- Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Sajipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006,
- Soimin, *Pembentukan Peraturan Negara Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Sunarno Siswanto, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008
- W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, *Legislatif Drafting, Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2009.

Wisnu Suharto, *Reklamasi Pantai dalam Prespektif Tata Air*, Semarang, Unika Soegijapranata, 1996.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Keppres Nomor 52 Tahun 1995 Tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta

Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan

Reklamasi Dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilu

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan

MPR,DPR DPD dan DPRD

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Presiden dan

Wakil Presiden

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Perpres Nomor 54 Tahun 2008 Tentang Penataan Ruang Kawasan

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah 2030

Perpres Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir

Dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota

Undang-Undang No 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir
Dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-
Undang

C. Sumber lainnya

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 2017. *Pedoman Umum
Pengelolaan Pulau-pulau Kecil yang Berkelanjutan dan Berbasis
Masyarakat*. Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Jakarta

Ruchyat Deni Djakapermana, Sekertaris Direktorat Jenderal Penataan Ruang, Reklamasi Pantai Sebagai Alternatif Pengembangan Kawasan. Kementerian PU.

<https://acch.kpk.go.id/images/ragam/makalah/pdf/reklamasi/Teluk-jakarta-reklamasi-atau-restorasi-alan-koropitan.pdf> diakses pada 8 Mei 2015 pukul 14.18 WIB